

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah saat ini dianggap sebagai lembaga yang tidak efisien, tidak praktis, dan birokratis, sehingga manajemen modern mengharapkan transparansi dan profesionalisme dari pemerintah. Selain itu, pada era sekarang perubahan administrasi publik semakin sering dilakukan terutama sejak filosofi *Reinventing Government* dan konsep *New Public Management* (NPM) diterima (Muhammadaong, 2017). Banyak negara termasuk Indonesia secara bertahap menerapkan NPM atau *Reinventing Government* ke dalam praktik manajemen pemerintahan mereka. Adanya perubahan tersebut, maka sistem pemerintah di Indonesia mengadopsi konsep NPM (Muhammadaong, 2017).

Konsep NPM ini mengajarkan bahwa pemerintah disarankan untuk meninggalkan model administrasi tradisional seperti mengutamakan sistem birokratis yang tidak efisien serta pemberian layanan yang lambat dan menggantikannya dengan orientasi terhadap kinerja dan hasil. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki pelayanan organisasi sektor publik dengan menetapkan tujuan dan target secara jelas dan fleksibel seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Bharata & Priyono, 2019).

BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Kegiatan BLU didasarkan atas prinsip efisiensi dan produktivitas yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1. Produktivitas tersebut didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan *input* (sumber daya) yang minimal untuk mencapai *output* dan hasil yang optimal dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi. (Fitrah & Handayati, 2022).

BLU dapat dibentuk di lingkungan pusat maupun lingkungan daerah. BLU ditingkat daerah dikenal dengan istilah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, BLU/D menyajikan informasi keuangannya dengan menggunakan dua standar akuntansi, yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP) dan standar akuntansi keuangan (SAK). Menurut Yanti *et al.* (2020) tujuan diberlakukannya SAP adalah untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah pusat dan daerah melalui informasi keuangan yang dihasilkan.

Informasi keuangan yang dihasilkan menjadikan suatu tuntutan yang tinggi bagi masyarakat di Indonesia dalam mendorong *good government*, sehingga diwajibkan untuk menerapkan akuntabilitas baik di lingkungan pemerintah pusat maupun lingkungan pemerintah daerah dengan memiliki tanggungjawab terhadap informasi keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan tindakan untuk memberikan informasi dan mengungkapkan tindakan serta kinerja keuangan kepada semua pihak

yang berkepentingan dalam rangka menegakkan hak-hak publik (Tambingon *et al.*, 2018). Adanya akuntabilitas dapat membantu memastikan bahwa anggaran dana dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan persyaratan, mencegah penyalahgunaan dan potensi pemotongan anggaran dana tersebut (Abor & Tetteh, 2023). Menurut Tooley dan Hooks (2020), peran akuntabilitas dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah manipulasi dan penipuan, sehingga mendorong legalitas perusahaan yang akuntabel kepada pemangku kepentingan yang tepat.

Informasi keuangan membutuhkan suatu pengawasan bagaimana keuangan dikelola sehingga output dari informasi keuangan tersebut menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi tentang posisi keuangan tahun fiskal dan hasil yang dianggarkan (Aldino & Septiano, 2021). Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi keuangan kepada para pengguna dalam proses pengambilan keputusan (Fuadah & Setiyawati, 2020). Dalam ruang lingkup BLU, kualitas informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pada era sekarang, kehadiran BLU dituntut untuk dapat memberikan respon cepat dalam meningkatkan kegiatan dan penyediaan pelayanan yang affordable, available, dan sustainable. Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan

efektivitas membuat BLU mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat. Namun, capaian kinerja BLU di Indonesia belum sepenuhnya optimal, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja BLU pada lima tahun terakhir sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BLU
Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
2018	110,72
2019	108,95
2020	110,37
2021	110,53
2022	110,19

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PPK BLU TA 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,34% dari tahun sebelumnya. NKO merupakan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja, sehingga dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh capaian NKO (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Nilai NKO mengalami penurunan dikarenakan indeks kepuasan publik atas layanan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) mengalami pembinaan yang kurang baik dalam memberikan pelayanan, sehingga berdampak pada kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

Menurut Kemendagri (2021) karena BLUD masih merupakan hal yang baru bagi pemerintah daerah, maka masih terdapat beberapa kesulitan dalam penerapannya di Indonesia. Akibatnya, penyusunan dan

penyajian pengelolaan keuangan BLUD yang setara dengan standar pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. (<https://nasional.tempo.co/>). Permasalahan tersebut menyebabkan informasi keuangan yang disusun dan dihasilkan kurang berkualitas. Hal ini didukung dengan penemuan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang menemukan 5.480 permasalahan keuangan di tahun 2019 senilai Rp 7,6 triliun pada ruang lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD dan BLUD hingga BUMN. Permasalahan ini meliputi 971 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 1.725 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 6,25 triliun, serta 2.784 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,35 triliun (www.bpk.go.id). Pada BLUD di Provinsi D.I. Yogyakarta masih terdapat target indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan kinerja sehat pada triwulan I tahun 2023 yang belum terealisasikan.

Berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan dan BLU/BLUD belum sepenuhnya terpenuhi/terrealisasi dengan capaian penyerapannya sebesar 15,88% (www.bpk.go.id). Selain itu, terdapat kasus korupsi pada BLUD di Provinsi D.I. Yogyakarta lebih tepatnya BLUD yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Menurut detik.com (2023) tindakan korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pada BLUD tersebut yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 470 juta. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa BLUD di Provinsi D.I. Yogyakarta belum sepenuhnya mencapai target kinerja keuangan maupun non-keuangan.

Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh BLUD belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Selain itu, dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik dan tingkat kualitas informasi keuangan dalam pengambilan keputusan.

Kualitas informasi akuntansi keuangan sering dianggap subyektif dan dinilai dari sudut pandang pengguna yang berbeda. Meskipun konsep kualitas informasi akuntansi keuangan cukup beragam dan diukur dari berbagai perspektif, terdapat banyak kriteria yang saling tumpang tindih diantara pandangan-pandangan tersebut (Thoa & Nhi, 2020). Informasi keuangan di Indonesia dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi empat kriteria kualitas kualitatif informasi keuangan yaitu: (a) relevansi; (b) reliabilitas; (c) keterbacaan; dan (d) dapat dibandingkan (Henny *et al.*, 2021). Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Faktor lain dalam menentukan kualitas informasi keuangan adalah peran sumber daya manusia (SDM) yang baik dengan memiliki tingkat pengetahuan akuntansi yang tinggi. Pengetahuan akuntansi ini memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas informasi keuangan. Menurut

Prihandani *et al.*, (2020) pengetahuan akuntansi adalah suatu pemahaman yang jelas mengenai fakta, kebenaran atau informasi dalam proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Apabila rendahnya pengetahuan dan pemahaman akuntansi, maka akan berdampak pada kualitas informasi keuangan dan para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Sehingga para pegawai/staff yang bersangkutan dalam menyusun pelaporan informasi keuangan dituntut untuk berusaha memahami terkait pengetahuan dan pemahaman dibidang akuntansi. Hal ini sejalan dengan penjelasan ayat Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat 39-40, yang berbunyi:

يُرَىٰ سَوَافٍ سَعْيُهُ وَأَنَّ سَعْيًا مَّا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنَّ

Artinya: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa apabila seorang pegawai/staff dalam melaksanakan pekerjaannya, harus memiliki usaha untuk memahami segala hal termasuk pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi. Sehingga kinerja yang mereka hasilkan dapat sesuai dengan standar yang berlaku sesuai dan standar pengawasan internal entitas.

Selain faktor pengetahuan akuntansi, faktor lain dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA). SIA merupakan bentuk perkembangan teknologi saat ini. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi ini memiliki manfaat bagi pengguna teknologi informasi. Suatu organisasi memanfaatkan teknologi

sebagai fasilitas sarana dan prasarana. Untuk mencapai tujuan, organisasi harus meningkatkan standar sumber daya yang mendukung kinerjanya. Pencapaian tersebut ditentukan kemampuan dari pegawai dalam penggunaan sistem informasi atau TI (Maita *et al.*, 2022). Sehingga kemampuan penggunaan sistem informasi dan TI merupakan tanggungjawab pegawai.

Efisiensi SIA hanya dapat dicapai jika setiap anggota bekerja dengan benar (Huy & Phuc, 2020). Menurut Ernawatiningsih & Kepramareni (2019) penggunaan sistem informasi berbasis komputer akan membantu dan mempercepat manajemen dalam memperoleh informasi yang akan diolah sedemikian rupa sehingga tercipta keluaran informasi yang memudahkan pengambilan keputusan yang dapat dipercaya. Penggunaan teknologi informasi akuntansi oleh suatu organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengolahan data dari sistem manual ke sistem komputer dan pengembangan perangkat lunak akuntansi yang akan mempermudah pembuatan laporan keuangan (Muda *et al.*, 2017).

Fungsi akuntansi berkemampuan IT modern dilakukan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi (SIA) yang berpotensi relevan dalam keputusan *outsourcing* akuntansi (Asatiani *et al.*, 2019). Menurut Susanto & Meiryani, (2019) pengembangan SIA membantu organisasi dalam memecahkan masalah, mengurangi risiko ancaman keamanan serta meningkatkan efisiensi organisasi manajemen akuntansi dan proses pelaporan. Menurut Romney & Steinbart, (2015) hanya terdapat enam komponen dalam SIA salah satunya adalah ketersediaan dan fungsi jaringan

komunikasi. Aksesibilitas jaringan digunakan untuk memastikan bahwa hanya data keuangan yang akurat yang dapat digunakan dalam sistem dan menurunkan kemungkinan kesalahan (McCallig *et al.*, 2019).

Perkembangan teknologi yang paling mendominasi saat ini adalah penggunaan jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi terutama internet telah mendorong kemajuan revolusioner dalam sistem komunikasi yang memungkinkan pengendalian dan pengawasan yang lebih baik (Sofyani *et al.*, 2023). Tingginya permintaan dalam menyediakan data mengenai informasi keuangan menyebabkan suatu organisasi memanfaatkan peran teknologi dengan baik terutama dalam hal ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi. Namun, di beberapa organisasi pemanfaatan teknologi tersebut masih kurang optimal, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta kurangnya komitmen untuk mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Sehingga laporan keuangan memiliki kualitas kurang baik (Gasperz, 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tahar *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Hal ini terdukung dengan penelitian yang dilakukan Komala (2012) yang mengungkapkan bahwa teknologi jaringan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Penelitian lain yang dilakukan Hakim & Wibowo (2022); Gasperz (2019); dan Jatmiko *et al.*, (2020) membuktikan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan.

Berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, penelitian yang dilakukan Thoa & Nhi (2022) menjelaskan bahwa ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Temimi & Abdullah (2023); Lesi & Safkaur (2020); Soleh *et al.* (2020); Siallagan (2022); Erawati & Abdulhadi (2018); dan Pravasanti & Ningsih (2019) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan.

Selain faktor tersebut, peran kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan akuntansi memiliki peran penting dalam kualitas informasi keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Thoa & Nhi (2020); Hanifah *et al.*, (2020) Purba & Purba (2023); Lestari (2020); dan Setyobudi (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan, sedangkan penelitian Puteri *et al.*, (2019a) dan Erawati & Firas Abdulhadi (2018) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tahir *et al.*, (2020); Vidyasari (2018); Hariani (2018) dan Anggreini *et al.*, (2023) menghasilkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan. Berbeda dengan penelitian Yamen & Can (2023) dan Musa *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas

memiliki hubungan positif yang tidak signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Dengan demikian, terdapat inkonsistensi hasil yang dilakukan dari peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

Penelitian ini replikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah penelitian dari Siallagan (2022) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Pemerintah Kota Sibolga). Penelitian ini memodifikasi karena variabel yang digunakan mengurangi dan menambah variabel baru yang direkomendasikan oleh artikel sebelumnya. Apabila sebelumnya menggunakan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan, maka penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan akuntansi serta ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi sebagai variabel independen serta akuntabilitas sebagai variabel moderasi dengan objek penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi D.I. Yogyakarta

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Serta Ketersediaan Dan Fungsi Jaringan Komunikasi Terhadap Kualitas Informasi Keuangan dengan**

Akuntabilitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta).

Peneliti memilih Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sebagian besar telah menerapkan pola BLUD secara penuh, sehingga pengelolaan BLUD tersebut dapat menjadi percontohan di BLUD lainnya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi keuangan?
2. Apakah ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi keuangan?
3. Apakah akuntabilitas memperkuat pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan?
4. Apakah akuntabilitas memperkuat pengaruh ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi terhadap kualitas informasi keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi terhadap kualitas informasi keuangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah akuntabilitas memperkuat pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan.

4. Untuk membuktikan secara empiris apakah akuntabilitas memperkuat ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi terhadap kualitas informasi keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi dalam bidang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pengetahuan akuntansi, ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi, kualitas informasi keuangan dan akuntabilitas serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan topik penelitian ini dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran sebagai pertimbangan untuk Badan Layanan Umum Daerah dalam kualitas penyajian informasi keuangan.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengetahuan serta pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi terutama dalam aspek ketersediaan jaringan informasi agar meningkatkan kualitas informasi keuangan pada ruang lingkup Badan Layanan Umum Daerah.

b. Bagi Bidang Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi apa yang telah diketahui mahasiswa tentang sistem informasi akuntansi terutama

pada bidang akuntansi sektor publik dan dapat memfasilitasi kemampuan mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan mengenai bagaimana kualitas informasi keuangan dapat dibuat dan dihasilkan pada ruang lingkup Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)